

Butuh Iklim Usaha Sehat Hadapi MEA

YOGYAKARTA – Kondisi persaingan iklim usaha di Indonesia menjadi hal yang perlu diperbaiki dengan segeranya memasuki era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Persaingan iklim usaha masyarakat ASEAN haruslah dilakukan secara sehat.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KKPU) Indonesia Munrokhim Misanam dalam Kuliah Umum bertema "Nurturing Fair Business Climate Through

Regional Integration and Harmonization of Competition Law in ASEAN" di UMY, kemarin. Menurut Munrokhim, saat ini terdapat beberapa kebijakan persaingan usaha menurut KPPU yang dapat berpotensi memicu konflik pada persaingan hukum usaha.

"Beberapa kebijakan di antaranya yaitu ketentuan-ketentuan yang dapat membuat sebuah perusahaan mendominasi sebuah posisi dan ketentuan-ketentuan yang memfasilitasi per-

janjian-perjanjian terhadap perusahaan untuk berhenti sejenak dalam menghadapi persaingan hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan bagian dari intervensi pemerintah pada pasar, yaitu untuk membatasi jumlah perusahaan yang tersebar di dalam pasar usaha bisnis," ungkapnya.

Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UMY Trisno Raharjo menuturkan, poin penting lain dalam menghadapi MEA yaitu

terkait dengan dorongan dalam memajukan bidang jasa. Kemudian dari kegiatan jasa tersebut akan memunculkan usaha dalam bentuk produk, yang kemudian dengan munculnya produk-produk tersebut akan menimbulkan persaingan dunia bisnis.

"Persaingan dunia usaha jika tidak diatur dengan baik, maka tidak akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas," ungkapnya.

● **ratih keswara**